

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Hubungi Kami

0343-42013

bakesbangpolkotapas@gmail.com

www.bakesbangpol.pasuruankota.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dipercayakan kepada instansi pemerintah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja atas penggunaan anggaran serta pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. LKjIP ini juga memuat informasi mengenai hasil yang dicapai dibandingkan dengan target kinerja tahunan maupun sasaran jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi.

Sebagai salah satu instrumen evaluasi kinerja, LKjIP memiliki peranan penting dalam menilai keberhasilan program dan kegiatan selama tahun berjalan. Selain menjadi bahan perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, laporan ini juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja pada tahun berikutnya. Melalui penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terlihat secara lebih jelas sejauh mana efektivitas pelaksanaan program serta kesesuaian antara rencana dan realisasi kinerja instansi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2025 ini disusun, semoga dapat menjadi informasi yang berguna bagi semua pihak.

Pasuruan, 02 Februari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

HERY DWI SUJATMIKO, S.Sos., M.M.
NIP. 19701223 199003 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Secara umum, capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Pasuruan pada tahun 2025 menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah selaras dengan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), secara umum capaian Bakesbangpol menunjukkan kinerja yang baik, dengan capaian kinerja sebesar 99,91% dari target yang ditetapkan. Adapun capaian per indikator dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu 1) Indeks Keharmonisan Sosial dengan realisasi 59,13% 2) Indeks Toleransi dengan realisasi 86,81% 3) Indeks Keterlibatan Komunitas dengan realisasi 50%. 4) Indeks Konflik Sosial dengan realisasi 40,59%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar target indikator telah tercapai dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja tahun berjalan antara lain, yaitu 1) Sebagian kegiatan belum dapat dilaksanakan sehubungan dengan penyesuaian terhadap kondisi dan situasi yang ada. 2) Belum optimalnya sistem pelaporan kegiatan dan dokumentasi berbasis data yang terintegrasi. 3) Masih terdapat organisasi kemasyarakatan atau komunitas yang belum terdaftar maupun belum melakukan pemutakhiran data kelembagaannya. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Bakesbangpol Kota Pasuruan telah menyiapkan beberapa langkah perbaikan, antara lain 1) Menyusun perencanaan kegiatan yang lebih fleksibel. 2) Meningkatkan penguatan sistem pelaporan dan dokumentasi kegiatan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. 3) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan kepada organisasi kemasyarakatan terkait kewajiban pendaftaran dan pemutakhiran data.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi 1
1.2.1 Isu-isu Strategis 2
1.2.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 3
1.2.4 Dukungan SDM 4
1.2.5 Sarana Prasarana 5
1.2.6 Anggaran 10
1.3 Dasar Hukum 10
1.4 Sistematika Laporan Kinerja 11
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 12
1.6 Langkah Perbaikan Internal PD atas Rekomendasi LKJIP 2023 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA 15
2.1 Tujuan dan Sasaran Indikator Knerja Lima Tahun Terakhir Perangkat Daerah 15
2.1.1 Strategi dan arah kebijakan 16
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024 23
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 24
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 36
3.1 Capaian Kinerja 36
3.1.1 Skala Capaian Kinerja 36
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan 36

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 39
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 39
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Kota /Daerah Lain.....42
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....43
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ...44
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 46
3.2 Realisasi Anggaran 50
3.3 Inovasi 53
BAB IV PENUTUP 55
4.1 Kesimpulan.....55
4.2 Rekomendasi 56
LAMPIRAN 58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Klasifikasi Pegawai 4
Tabel 1. 2 Klasifikasi Pegawai ASN Badan Kesatuan 5
Tabel 1. 3 Klasifikasi Pegawai ASN dan Non ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Tingkat Pendidikan 5
Tabel 1. 4 Daftar Nama Barang 6
Tabel 1.5 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024 10
Tabel 1. 6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 13
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 18
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 19
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan 23
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2024 25
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023 26
Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2024 30
Tabel 2. 7 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 31
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja 36
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024 37
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja 39
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 41
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Kota/daerah lain 42
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi 43
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan Sasaran 45
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 46
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 18 Struktur Organisasi Badan kesatuan Bangsa dan Politik 4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada prinsip Good Governance semakin tinggi di era sekarang. Aparatur pemerintah dituntut untuk bekerja secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sebagai bentuk akuntabilitas publik, kinerja yang telah dicapai oleh setiap instansi pemerintah, khususnya oleh pimpinan instansi, wajib dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini berfungsi memberikan gambaran tentang tingkat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus penggunaan anggaran yang telah dipercayakan kepada masing-masing perangkat daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Pasuruan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pembinaan kesatuan bangsa serta pemeliharaan stabilitas politik di daerah, turut berperan aktif dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ditegaskan bahwa

penyelenggaraan negara harus berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas tersebut meliputi kepastian hukum, ketertiban penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Dari keseluruhan asas tersebut, akuntabilitas menjadi prinsip utama yang menuntut agar setiap aktivitas dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Pertanggungjawaban ini diwujudkan melalui sistem akuntabilitas kinerja yang disusun dan disampaikan secara berkala serta melembaga.

Dengan demikian, LKjIP merupakan bentuk laporan tahunan yang berisi ringkasan pencapaian sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan organisasi. Informasi yang disajikan mencakup pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja utama, serta analisis perbandingan antara capaian dan target yang telah direncanakan dalam periode lima tahunan. Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan dasar dalam peningkatan kinerja instansi di tahun-tahun berikutnya.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Isu-isu Strategis

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah dan kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD maka isu-isu strategis yang menjadi sasaran untuk dipecahkan dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kondusifitas wilayah antara lain:

a. Penguatan Ketahanan Ideologi Pancasila

   Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme.

b. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Demokrasi

   Mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, bukan hanya ikut dalam proses

pemilihan, tapi juga dalam pengawasan dan pengambilan keputusan publik.

c. Peningkatan Deteksi Dini dan Cegah Dini Konflik Sosial

Membangun kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendeteksi serta mencegah potensi konflik sosial sejak dini.

1.2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Menurut Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, organisasi ini mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik (pasal 3). Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut (pasal 4) :

a. penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik;
d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan kesatuan Bangsa dan Politik



Sumber : Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.2.3 Dukungan SDM

Sumber daya Manusia yang tersedia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan sejumlah 40 orang terdiri dari ASN (PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu) dan tenaga EPL (Tenaga Kontrak dan THL)

Tabel 1. 1 Klasifikasi Pegawai
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A.	ASN			
	1. Pegawai Negeri Sipil	10	7	17
	2. PPPK	4	1	5
	3. PPPK PW	6	4	10
	TOTAL			32
B	Non. ASN			
	1. Tenaga EPL	7	1	8
	TOTAL Non ASN			8
	TOTAL KESELURUHAN	27	13	40

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

Berdasarkan table 1.1, pegawai Bakesbangpol Kota Pasuruan didominasi oleh pegawai laki-laki, yang mana total pegawai laki-laki berjumlah 27 orang, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 13 orang.

Tabel 1. 2 Klasifikasi Pegawai ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan IV	4	-	4
2	Golongan III	5	5	10
3	Golongan II	1	2	3
	JUMLAH	10	7	17

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat, berdasarkan golongan pegawai ASN Bakesbangpol terbanyak adalah golongan III.

Tabel 1. 3 Klasifikasi Pegawai ASN dan Non ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	ASN			Non ASN/EPL	Jumlah
		PNS	P3K	P3K PW		
1	S2	6	-	-	-	6
2	S1	7	4	4	3	18
3	D3	1	-	-	-	1
4	Sekolah Menengah Atas/sederajat	3	1	6	5	15
5	Sekolah Menengah Pertama/sederajat	-	-	-	-	-
	JUMLAH	17	5	10	8	40

Berdasarkan tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa tingkat Pendidikan pegawai Bakesbangpol paling banyak di lulusan S1 bagi pegawai ASN, sedangkan untuk Non ASN paling banyak di lulusan SMA.

1.2.4 Sarana Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung dengan sarana dan prasarana berupa barang inventaris Peralatan dan Mesin yang

tertuang dalam lampiran Kartu Inventaris Barang (KIB) B; Gedung dan Bangunan yang tertuang dalam KIB C; serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tertuang dalam KIB D.

Tabel 1. 4 Daftar Nama Barang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Toyota Rush	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2019
2	Toyota Avanza	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2009
3	Sepeda Motor Honda	6 unit	Baik : 6 unit Tahun Pembelian : 2006, 2007, 2009, 2010, 2016
4	Laptop	7 unit	Baik : 5 unit Tahun Pembelian : 2020, 2021, 2023 Rusak Berat : 2 unit Tahun Pembelian : 2017
5	Notebook	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian 2019 Rusak Berat : 9 unit Tahun Pembelian : 2011, 2012, 2015, 2016, 2018
6	PC	23 unit	Baik : 8 unit Tahun Pembelian : 2018, 2019, 2020 dan 2025 Rusak Berat : 15 unit Tahun Pembelian : 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
7	Printer	30 unit	Baik : 15 unit Tahun Pembelian : 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 Rusak Berat : 15 unit Tahun Pembelian : 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020
8	Scanner	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2019
9	Camera Electronic	1 unit	Rusak Berat : 1 unit Tahun Pembelian : 2014
10	Camera Film	1 unit	Rusak Berat : 1 unit Tahun Pembelian : 2013
11	Camera Digital	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2023
12	Pesawat Telephone	1 unit	Baik : 1 unit

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
			Tahun Pembelian : 2017
13	Faximile	1 unit	Rusak Berat : 1 unit Tahun Pembelian : 2015
14	AC	21 unit	Baik : 8 unit Tahun Pembelian : 2022, 2023, dan 2025 Rusak Berat : 13 unit Tahun Pembelian : 2013, 2014, 2015, 2016, 2018,
15	CCTV	2 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2023 Rusak Berat : 1 unit Tahun Pembelian : 2017
16	Mesin Absensi	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2016
17	Layar LCD Projector	2 buah	Rusak Berat : 2 buah Tahun Pembelian : 2015, 2018
18	Brandkas	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2015
19	Router	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2016
20	Peralatan Jaringan Lainnya	1 unit	Rusak Berat : 1 unit Tahun Pembelian : 2010
21	Peralatan Komputer Lainnya	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2016
22	Televisi	8 unit	Rusak Berat : 8 unit Tahun Pembelian : 2008, 2010, 2015, 2016, 2017
23	Mesin Hitung Manual	2 unit	Baik : 2 unit Tahun Pembelian : 2015
24	Lemari Besi	9 buah	Baik : 5 buah Tahun Pembelian : 2016, 2018, 2019 Rusak Berat : 4 buah Tahun Pembelian : 2009
25	Lemari Kayu	1 buah	Baik : 1 buah Tahun pembelian : 2017
26	Lemari Kaca	1 buah	Baik : 1 buah Tahun Pembelian : 2017
27	Filling Kabinet	4 buah	Baik : 4 buah Tahun Pembelian : 2014, 2017
28	Papan Visual / Papan Nama	1 buah	Baik : 1 buah Tahun Pembuatan : 2017
29	White Board	2 buah	Rusak Berat : 2 buah Tahun Pembelian : 2012

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
30	Termometer	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2020
31	Kotak Surat	5 buah	Rusak Berat : 5 buah Tahun Pembelian : 2016
32	Papan Pengumuman	1 buah	Baik : 1 buah Tahun Pembelian : 2016
33	Meja Kerja Kayu	8 buah	Baik : 2 buah Tahun Pembelian : 2016 Rusak Berat : 6 buah Tahun Pembelian : 2009, 2012, 2014
34	Meja Rapat	15 buah	Baik : 14 buah Tahun Pembelian : 2016, 2021, 2023 Rusak Berat : 1 buah Tahun : 2015
35	Meja Komputer	1 buah	Baik : 1 buah Tahun Pembelian : 2021
36	Kursi Rapat	8 buah	Baik : 6 buah Tahun Pembelian : 2014 Rusak Berat : 1 buah Tahun : 2014 Rusak Berat : 1 buah Tahun : 2014
37	Kursi Putar	15 buah	Baik : 14 buah Tahun Pembelian : 2021 Rusak Berat : 1 buah Tahun : 2021
38	Kursi Lipat	106 buah	Baik : 50 buah Tahun Pembelian : 2009 Rusak Berat : 56 buah Tahun Pembelian : 2015, 2016
39	Sofa	3 buah	Baik : 1 buah Tahun Pembelian : 2023 Rusak Berat : 2 buah Tahun Pembelian : 2009, 2017
40	Alat Penghancur Kertas	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2015
41	Alat Tenis Meja	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2018
42	Jam	6 buah	Baik : 2 buah Tahun Pembelian : 2016 Rusak Berat : 4 buah Tahun Pembelian : 2013, 2014
43	Vacuum Cleaner	6 buah	Rusak Berat : 6 buah Tahun Pembelian : 2017

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
44	Lemari Es	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2010
45	Kipas Angin	4 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2018 Rusak Berat : 3 unit Tahun Pembelian : 2015 dan 2019
46	Exhause Fan	4 buah	Baik : 4 buah Tahun Pembelian : 2018
47	Tabung Gas	2 buah	Baik : 2 buah Tahun Pembelian : 2018
48	Megaphone	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2019
49	Microphone	2 buah	Baik : 2 buah Tahun Pembelian : 2017
50	Unit Power Supply	2 unit	Rusak Berat : 2 unit Tahun Pembelian : 2014
51	Dispenser	4 unit	Rusak Berat : 4 unit Tahun Pembelian : 2019
52	Mimbar/Podium	1 buah	Baik : 1 buah Tahun Pembelian : 2021
53	Vertical Blind	129 buah	Rusak Berat : 129 buah Tahun Pembelian : 2010, 2013, 2014, 2017
54	Gordyn/Kray	61 buah	Baik : 31 buah Tahun Pembelian : 2023 Rusak Berat : 30 buah Tahun Pembelian : 2018
55	Meja Kerja Eselon III	1 buah	Baik : 1 buah Tahun Pembelian : 2016
56	Meja Kerja Eselon II	1 buah	Baik : 1 buah Tahun Pembelian : 2014
57	Kursi Eselon III	3 buah	Baik : 2 buah Tahun Pembelian : 2014 Rusak Berat : 1 buah Tahun Pembelian : 2009
58	Kursi Eselon IV	2 buah	Rusak Berat : 2 buah Tahun Pembelian : 2015
59	Kursi Pegawai	10 buah	Baik : 10 buah Tahun Pembelian : 2009
60	Lemari Buku Eselon III	2 buah	Baik : 2 buah Tahun Pembelian : 2015
61	Audio Amplifier	1 unit	Baik : 1 unit Tahun Pembelian : 2014

1.2.6 Anggaran

Berikut merupakan tabel perbandingan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 dan tahun 2025.

Tabel 1.5 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2024	Rp 36.433.594.600
APBD	Tahun 2025	Rp 8.810.061.555

Sumber : DPPA Tahun 2024 dan 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

Berdasarkan tabel 1.5, diketahui Anggaran Bakesbangpol pada tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan hingga empat kali lipat dibandingkan tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan operasional dalam rangka menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, termasuk memfasilitasi kelancaran Pemilu, koordinasi dengan aparat keamanan, penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu), dan pemerintah daerah.

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia;
3. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerint ah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan;
11. Peraturan Walikota Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II : Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.

BAB III: Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : Penutup

Berisi kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan pemanfaatannya untuk umpan balik bagi perencanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Matriks Renstra Bakesbangpol

2.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025, terdapat beberapa rekomendasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berikut merupakan rekomendasi beserta tindak lanjut atas catatan yang ditemukan.

Tabel 1. 6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Tahun 2025

No	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	Menyesuaikan perencanaan kinerja di tahun mendatang antara sasaran, indikator, perumusan hasil harus selaras dan target dengan realisasi bisa tercapai realistis maupun menantang	1. Melakukan review dan penyelarasan dokumen perencanaan kinerja (Pohon Kinerja, Casecading,Renstra, Renja, PK, dan IKU) dengan memperhatikan keterkaitan logis antara sasaran, indikator, dan hasil. 2. Mengadakan rapat koordinasi perencanaan kinerja lintas bidang untuk memastikan keselarasan indikator dan target. 3.Melakukan pendampingan bersama Bagian Organisasi atau Bappelitbangda dalam perumusan indikator dan target kinerja.	Triwulan I Tahun 2026 (selambatnya Maret 2026) untuk finalisasi dokumen perencanaan.	-
2	Melaksanakan perencanaan kinerja yang memadai mulai dari pimpinan sampai ke bawah serta ditetapkan tepat waktu lalu diketahui, dipahami dan diperdulikan setiap pegawai Unit Kerja.	1. Menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang mulai dari Kepala Bakesbangpol hingga pejabat pelaksana. 2. Melakukan sosialisasi internal agar seluruh pegawai memahami sasaran dan indikator kinerja instansi. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal (melalui rapat evaluasi bulanan/triwulanan).	Triwulan II Tahun 2026 (selambatnya Juni 2026), dengan evaluasi awal dilakukan sejak Triwulan I 2026.	-

2.6 Langkah Perbaikan Internal PD atas Rekomendasi LKJIP 2024

Berdasarkan rekomendasi LHE SAKIP tahun 2025, disebutkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk 1) Menyesuaikan perencanaan kinerja di tahun mendatang antara sasaran, indikator, perumusan hasil harus selaras dan target dengan realisasi bisa tercapai realistis maupun menantang. 2) Melaksanakan perencanaan kinerja yang memadai mulai dari pimpinan sampai ke bawah serta ditetapkan tepat waktu lalu diketahui, dipahami dan diperdulikan setiap pegawai Unit Kerja. Langkah perbaikan

yang sudah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diantaranya adalah :

1. Penyempurnaan dokumen perencanaan tahun 2026 agar selaras antara sasaran, indikator, dan hasil.
2. Revisi indikator kinerja yang belum selaras dengan dokumen perencanaan.
3. Penguatan koordinasi antar bidang agar setiap target dapat dicapai dengan realistis dan menantang
4. Setiap pegawai memiliki PK individu dan memahami keterkaitannya dengan PK unit kerja.
5. Peningkatan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap target kinerja.
6. Tersedianya dokumentasi sosialisasi, daftar hadir, dan notulen evaluasi sebagai bukti pelaksanaan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

1.1 Tujuan dan Sasaran Indikator Knerja Lima Tahun Terakhir Perangkat Daerah

a. Visi

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan 2025-2029 sebagai berikut:

PASURUAN KOTA ANUGRAH

" Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya, dan Indah Kotanya".

b. Misi

Untuk mewujudkan visi Walikota Pasuruan, misi yang akan dilaksanakan sebagai Misi Walikota Pasuruan 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang rensponsif dan merata berbasis digital
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul melalui akses pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkualitas
3. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi local
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berorientasi pada peran kepemudaan, kebudayaan dan harmonisasi sosial
5. Mewujudkan kota yang indah dan nyaman melalui penguatan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkelanjutan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan memiliki peran penting dalam mendukung misi ke empat yaitu 4 meningkatkan kesejahteraan masyarakat berorientasi pada peran kepemudaan, kebudayaan dan harmonisasi sosial. Untuk mencapai misi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah merumuskan Tujuan yaitu " Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Toleransi dan Rukun ". Tujuan tersebut memiliki indikator

Indeks Keharmonisan Sosial, dengan harapan dapat mengukur tingkat keharmonisan antar kelompok masyarakat.

c. Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan kriteria tersebut, tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Toleransi dan Rukun. Sasarannya yaitu 1) Meningkatnya Toleransi Masyarakat 2) Meningkatnya Keterlibatan Komunitas 3) Menurunnya konflik sosial di masyarakat.

1.1.1 Strategi dan arah kebijakan

a. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Dengan kata lain visi misi yang sudah dirancang merupakan tujuan Kota Pasuruan yang harus diwujudkan. Strategi melibatkan perencanaan dan pengambilan keputusan yang sistematis, berdasarkan analisis situasi, sumber daya yang tersedia, dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai mewujudkan visi dan misi tahun 2025-2029 adalah :

- Penyusunan roadmap pembinaan wawasan kebangsaan
- Sosialisasi masif nilai Pancasila ke pelajar dan masyarakat

- Meningkatkan kapasitas tim terpadu penanganan konflik sosial di daerah.
- Pelatihan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Ormas
- Koordinasi Forkopimda dan penguatan kewaspadaan dini
- Digitalisasi sistem deteksi konflik

b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan mencerminkan visi dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, pemerintah, atau lembaga, serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Arah kebijakan berisikan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dengan mengacu pada tujuan di atas, sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dirumuskan yaitu Meningkatnya Kondusifitas Wilayah. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Renstra 2021/2025									
	Terwujudnya Masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan & nilai-nilai luhur Pancasila			Indeks Stabilitas	89,00	-	-	-	-
		Meningkatnya Ketahanan dan Kondusifitas Wilayah		Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	8,3	-	-	-	-
		Meningkatnya Ketahanan dan Kondusifitas Wilayah		Persentase penurunan potensi konflik di Kota Pasuruan	21	-	-	-	-
Renstra 2025/2029									
1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Toleransi dan Rukun			Indeks Keharmonisan Sosial	59,83	60,00	61,00	61,67	62,67
		1.1	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi	89,5	90	91	92	93
		1.2	Meningkatnya Keterlibatan Komunitas	Indeks Keterlibatan Komunitas	45	47	52	55	58
		1.3	Menurunnya konflik sosial di masyarakat	Indeks Konflik Sosial	45	43	40	38	37

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Renstra 2021/2025							
	Tujuan : Terwujudnya Masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan & nilai-nilai luhur Pancasila	Indeks Stabilitas	89,00	Persen	Indeks stabilitas adalah suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kestabilan Kota Pasuruan dari gangguan keamanan dan ketertiban. Indeks stabilitas disusun dari kombinasi dimensi Melestarikan lingkungan dan patuh pada peraturan negara.	Survey	Bapperida
	Sasaran : Meningkatnya Ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	8,3	Persen	Ormas aktif adalah ormas yang telah teregistrasi di Bakesbangpol Kota Pasuruan	$\frac{\text{Jumlah ormas aktif tahun (n) - Jumlah ormas aktif tahun (n-1)}}{\text{Jumlah ormas aktif thn (n-1)}} \times 100\ \%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
	Meningkatnya Ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase penurunan potensi konflik di Kota Pasuruan	21	Persen	Konflik merupakan bagian dari potensi konflik yang tidak termediasi/tertangani dan menimbulkan perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Sedangkan potensi konflik adalah suatu peristiwa yang memberikan peluang dimana terjadinya pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok maupun kelompok dengan pemerintah. Dalam hal ini, suatu even yang melibatkan pengumpulan masa di atas 100 orang bisa disebut sebagai potensi konflik.	$\frac{\text{Jumlah potensi konflik thn (n-1) - jumlah potensi konflik thn n}}{\text{Jumlah potensi konflik thn (n-1)}} \times 100\,\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
Renstra 2025/2029							
	Tujuan: Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Toleransi dan Rukun	Indeks Keharmonisan Sosial	59.83	Indeks	Mengukur tingkat keharmonisan antar kelompok masyarakat berdasarkan beberapa indikator yaitu Indeks Toleransi, Indeks Keterlibatan Komunitas dan Indeks Konflik Sosial	Jumlah rata-rata nilai dari Indeks Toleransi, Indeks Keterlibatan Komunitas dan Indeks Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sasaran							
1.	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi	89.5	Indeks	Menilai seberapa besar toleransi masyarakat terhadap perbedaan agama, etnis, dan budaya	Jumlah rata-rata dari variabel antar manusia dan variabel etika, budi pekerti	Bapperida
2	Meningkatnya Keterlibatan Komunitas	Indeks Keterlibatan Komunitas	45	Indeks	Mengukur seberapa banyak lembaga (Ormas, Lembaga Ekososbud, Lembaga Pendidikan dan Parpol) yang terlibat dalam kegiatan pembinaan di Bakesbangpol.	Total skor keterlibatan komunitas / (Jumlah kegiatan keterlibatan komunitas x5) x 100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Menurunnya konflik sosial di masyarakat	Indeks Konflik Sosial	45	Indeks	Mengukur Jumlah insiden konflik yang terjadi di Kota Pasuruan, terdiri dari beberapa jenis konflik yaitu: 1. cek-cok/tawuran antar warga 2. Pencurian/pelanggaran hukum ringan 3. Tawuran/keributan/pengeroyokan 4. Pelanggaran norma/tatib umum	= Jumlah pengguna hak pilih PEMILU tahun terakhir / Jumlah DPT PEMILU tahun terakhir x 100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
					5. SARA/konflik antar kelompok besar catatan : semakin sedikit konflik, semakin tinggi nilai skor artinya semakin aman kondisi wilayah.		

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Adapun tujuan dan sasaran berserta Indikator selaras dengan Renja PD tahun 2025 yang dituangkan pada tabel dibawa ini :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
Renja Tahun 2025						
	Terwujudnya Masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan & nilai-nilai luhur Pancasila			Indeks Stabilitas	Persen	89,00
		1.1	Meningkatnya Ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	Persen	8,3
		1.2	Meningkatnya Ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase penurunan potensi konflik di Kota Pasuruan	Persen	21
Renja Perubahan Tahun 2025						
1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Toleransi dan Rukun			Indeks Keharmonisan Sosial	Indeks	59,83
		1.1	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi	Indeks	89,5
		1.2	Meningkatnya Keterlibatan Komunitas	Indeks Keterlibatan Komunitas	Indeks	45
		1.3	Menurunnya konflik sosial di masyarakat	Indeks Konflik Sosial	Indeks	45

Sumber : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat perbedaan tujuan dan indikator kinerja antara Renja Awal dan Renja Perubahan Tahun 2025. Pada Renja Awal, tujuan difokuskan pada terwujudnya masyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan, dengan indikator kinerja berupa Indeks Stabilitas

serta indikator pendukung yang menekankan pada peningkatan keaktifan ormas dan penurunan potensi konflik.

Selanjutnya, pada Renja Perubahan dilakukan penyesuaian tujuan menjadi meningkatnya kehidupan masyarakat yang toleran dan rukun, dengan indikator kinerja utama Indeks Keharmonisan Sosial serta indikator pendukung berupa Indeks Toleransi Masyarakat, Indeks Keterlibatan Komunitas, dan Indeks Konflik Sosial. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyelaraskan perencanaan kinerja dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasa revaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Toleransi Masyarakat.	Indeks Toleransi	89,5
2	Meningkatnya Keterlibatan Komunitas	Indeks Keterlibatan Komunitas	45
3	Menurunnya konflik sosial di masyarakat	Indeks Konflik Sosial	45

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025

Program	Anggaran
1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp 988.007.000
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 1.501.370.400
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 1.005.203.200
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp 384.477.300
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 1.735.185.900
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.800.572.812

Adapun anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan DPA Perangkat Daerah yang dituangkan pada tabel dibawa ini :

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu***	***100***
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	*6*
	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat daerah	1
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu***	***100***
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	17
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu***	***100***
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya***	***100***
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran***	**100**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah***	***100***
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran***	**100**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	***Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara***	***100***
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	19
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantro dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1
2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**10**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	***Persentase Peningkatan Peningkatan Penanganan Konflik***	***3***
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1
	Pembentukan PASKIBRAKA	Jumlah PASKIBRAKA	74
3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Pendidikan Politik**	**20**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	***Jumlah pemilih pemula yang dibina***	255
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun	1
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	189
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyaakat yang Ber SKT**	***3***
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyaakat yang dibina**	***40***
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	185
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40
	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Prosentase Lembaga Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Aktif**	**20**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Prosentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif**	**85**
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	**40**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1
6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Prosentase Konflik yang dimediasi**	**75**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	***Persentase Peningkatan Penanganan Konflik***	***3***
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3750
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yaitu melakukan kegiatan pemantauan orang asing, TKA asing dan lembaga asing	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan terhadap proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 18 September 2025 telah dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang disebabkan oleh perubahan strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan

sasaran, khususnya perubahan alokasi anggaran, serta ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025–2029.

Penetapan Renstra baru tersebut berimplikasi pada penyesuaian tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga diperlukan penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 agar selaras dengan arah kebijakan dan perencanaan strategis yang baru . Adapun uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Toleransi dan Rukun	Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif	Indeks Keharmonisan Sosial	89	59,83
2	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	Indeks Toleransi	8,3	89,5
3	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Meningkatnya Keterlibatan Komunitas	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	Indeks Keterlibatan Komunitas	21	45
4		Menurunnya konflik sosial di masyarakat		Indeks Konflik Sosial		45

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025

Program	Anggaran
1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp 855.722.900
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 1.347.720.700

Program	Anggaran
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 424.072.700
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp 293.984.300
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 2.240.526.400
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.648.034.555

Dengan rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu***	***100***
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	*6*
	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat daerah	1
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu***	***100***
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	17
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu***	***100***

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya***	***100***
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran***	**100**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah***	***100***
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran***	**100**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	***Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara***	***100***
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	19
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantro dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1
2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**10**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	***Persentase Peningkatan Peningkatan Penanganan Konflik***	***3***
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1
	Pembentukan PASKIBRAKA	Jumlah PASKIBRAKA	74
3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Pendidikan Politik**	**20**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	***Jumlah pemilih pemula yang dibina***	255
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun	1
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	106
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyaakat yang Ber SKT**	***3***
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyaakat yang dibina**	***40***
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	510
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	95

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Prosentase Lembaga Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Aktif**	**20**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Prosentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif**	**85**
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	160
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1
6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Prosentase Konflik yang dimediasi**	**75**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	***Persentase Peningkatan Penanganan Konflik***	***3***
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3750
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yaitu melakukan kegiatan pemantauan orang asing, TKA asing dan lembaga asing	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1

Sumber : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota PasuruanTahun 2025

1.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja merupakan alat, metode, atau mekanisme yang digunakan untuk mendukung dan memastikan pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Berikut merupakan faktor-faktor pendorong dalam pencapaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan :

1. Dukungan kebijakan dari pimpinan daerah yang kuat terhadap program pembinaan ideologi Pancasila, politik dalam negeri, dan ketahanan nasional.
2. Sinergi dan komunikasi yang baik antara Bakesbangpol dengan Forkopimda, TNI/Polri, dan perangkat daerah terkait.
3. Antusiasme masyarakat, pelajar, dan ormas dalam mengikuti kegiatan pembinaan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi	89,5	86,81	96,99%	Sangat Tinggi	Bapperida
2	Meningkatnya Keterlibatan Komunitas	Indeks Keterlibatan Komunitas	45	50	111,11%	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Menurunnya konflik sosial di masyarakat	Indeks Konflik Sosial	45	40,59	110,86%	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.2 diketahui bahwa terdapat 3 indikator Kinerja Utama dan satu tujuan Bakesbangpol Kota Pasuruan yaitu :

a. Indeks Toleransi

Indeks Toleransi pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 89,5, dan terealisasi sebesar 86,81%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 96,99%. Indeks Toleransi dihitung berdasarkan penggabungan dua dimensi utama, yaitu dimensi relasi antar manusia serta dimensi etika dan budi pekerti. Dimensi relasi antar manusia menggambarkan kemampuan masyarakat dalam menjalin hubungan yang harmonis, menghargai perbedaan, serta bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, dimensi etika dan budi pekerti mencerminkan penerapan nilai-nilai moral, sikap saling menghormati, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Penggabungan kedua dimensi tersebut menghasilkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai tingkat toleransi masyarakat, baik dalam interaksi sosial maupun dalam penghormatan terhadap norma dan nilai yang berlaku.

b. Indeks Keterlibatan Komunitas

Indeks Keterlibatan Komunitas pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 45 dan terealisasi sebesar 50, sehingga capaian kinerjanya mencapai 111,11%. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan perbandingan total skor keterlibatan komunitas terhadap jumlah kegiatan keterlibatan komunitas yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun. Pada tahun 2025, jumlah kegiatan keterlibatan komunitas yang dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan dengan total skor sebesar 10. Nilai indeks diperoleh dari hasil pembagian total skor keterlibatan komunitas dengan jumlah kegiatan, selanjutnya dibandingkan dengan skor maksimum penilaian dan dikonversi ke dalam bentuk indeks. Dengan demikian, nilai Indeks Keterlibatan Komunitas sebesar 50, yang berada pada kategori sedang, sehingga dapat diartikan bahwa tingkat partisipasi komunitas berada pada level sedang.

c. Indeks Konflik Sosial

Indeks Konflik Sosial pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 45 dan terealisasi sebesar 40,59. Indikator ini merupakan indikator denga tren negatif, di mana semakin rendah nilai indeks menunjukkan kondisi yang semakin baik. Capaian Indeks Konflik Sosial diperoleh berdasarkan perbandingan total skor jenis konflik terhadap jumlah jenis konflik yang terjadi pada 4 kecamatan selama satu tahun. Pada tahun 2025, total skor jenis konflik yang tercatat sebesar 136. Nilai indeks dihitung dengan membagi total skor jenis konflik dengan jumlah jenis konflik, kemudian dibandingkan dengan skor maksimum penilaian dan dikonversi ke dalam bentuk indeks. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nilai Indeks Konflik Sosial sebesar 40,59 yang berada pada kategori waspada sedang, yang menunjukkan bahwa kondisi konflik sosial masih memerlukan perhatian dan pengendalian lebih lanjut.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024			Tahun 2025			Ket
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	5%	8,20%	164%	-	-	-	
2	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	20%	20,69%	103,45%	-	-	-	
3	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi	-	-	-	89,5	86,81	96,99%	
4	Meningkatnya Keterlibatan Komunitas	Indeks Keterlibatan Komunitas	-	-	-	45	50	111,11%	
5	Menurunnya konflik sosial di masyarakat	Indeks Konflik Sosial	-	-	-	45	40,59	110,86%	

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.3, perkembangan capaian kinerja dari tahun 2024 hingga 2025 menunjukkan arah kinerja yang relatif positif, meskipun terjadi perubahan indikator kinerja yang digunakan.

Pada tahun 2024, pengukuran kinerja difokuskan pada indikator berbasis persentase, seperti peningkatan jumlah ormas aktif dan penurunan konflik di Kota Pasuruan. Seluruh indikator pada tahun tersebut menunjukkan capaian di atas target, yang mencerminkan kinerja perangkat daerah dalam menjaga ketahanan, kondusivitas wilayah, serta pengendalian potensi konflik sosial.

Memasuki tahun 2025, terjadi penyempurnaan indikator kinerja dengan penggunaan indikator berbasis indeks, yaitu Indeks Toleransi, Indeks Keterlibatan Komunitas, dan Indeks Konflik Sosial. Perubahan ini

bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan terukur terhadap kondisi sosial masyarakat. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan, bahkan beberapa indikator menunjukkan capaian di atas 100 persen.

Indeks Toleransi dan Indeks Keterlibatan Komunitas menunjukkan kondisi yang relatif baik, yang mencerminkan terjaganya hubungan sosial serta partisipasi masyarakat. Sementara itu, Indeks Konflik Sosial sebagai indikator bernilai terbalik menunjukkan capaian yang melampaui target, yang menandakan bahwa tingkat konflik sosial masih berada dalam kondisi yang terkendali, meskipun tetap memerlukan perhatian berkelanjutan.

Secara umum, tren perkembangan kinerja dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kehidupan sosial kemasyarakatan, dengan pergeseran dari pengukuran kuantitatif menuju pengukuran yang lebih menyeluruh dan berbasis indeks.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4/5*100
1	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi	86,81	93	93,34%
2	Meningkatnya Keterlibatan Komunitas	Indeks Keterlibatan Komunitas	50	62	80,65%
3	Menurunnya konflik sosial di masyarakat	Indeks Konflik Sosial	40,59	35	86,23%

Sumber : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Periode 2025-2029

Berdasarkan Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis, tingkat kemajuan kinerja menunjukkan seberapa dekat realisasi kinerja tahun berjalan terhadap target akhir Rencana Strategis yang ditetapkan untuk periode 2025–2029.

Pada sasaran strategis Meningkatnya Toleransi Masyarakat, realisasi Indeks Toleransi pada tahun berjalan mencapai 86,81, dari target akhir Renstra sebesar 93. Dengan demikian, tingkat kemajuan yang telah dicapai sebesar 93,34%, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja telah mendekati target jangka menengah dan berada pada jalur yang sesuai dengan rencana pencapaian Renstra.

Sasaran strategis Meningkatnya Keterlibatan Komunitas menunjukkan realisasi Indeks Keterlibatan Komunitas sebesar 50 dari target akhir Renstra sebesar 62, dengan tingkat kemajuan sebesar 80,65%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kinerja telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, namun masih memerlukan upaya peningkatan agar target jangka menengah dapat tercapai secara optimal pada akhir periode Renstra.

Sementara itu, tingkat kemajuan Indeks Konflik Sosial dihitung menggunakan metode indikator bernilai terbalik, yaitu dengan membandingkan target akhir Rencana Strategis terhadap realisasi kinerja tahun berjalan. Target akhir Renstra belum tercapai, namun kemajuan

menuju target sudah cukup baik. Masih dibutuhkan penurunan tingkat konflik sosial agar target 35 tercapai

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Kota /Daerah Lain

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar Kota/Daerah lain

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Kota/daerah lain

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Kota/Daerah lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi	86,81	-	-
2	Meningkatnya Keterlibatan Komunitas	Indeks Keterlibatan Komunitas	50	-	-
3	Menurunnya konflik sosial di masyarakat	Indeks Konflik Sosial	40,59	-	-

Sumber : data tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang disajikan dalam LKjIP, ketercapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan belum dapat dibandingkan secara langsung dengan standar nasional maupun capaian kinerja daerah/kota lain. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan indikator dan metode pengukuran yang digunakan.

Indikator kinerja yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan disusun berdasarkan kebutuhan, karakteristik, serta prioritas daerah, sehingga tidak seluruhnya memiliki kesesuaian dengan indikator yang digunakan pada tingkat nasional maupun oleh pemerintah daerah lain. Akibatnya, capaian kinerja yang diperoleh di daerah lain tidak dapat dijadikan pembanding yang relevan terhadap capaian kinerja Kota Pasuruan.

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi	89,5	86,81	96,99%	Realisasi Indeks Toleransi belum mencapai target yang ditetapkan, karena nilai realisasi masih berada di bawah target tahun berjalan. Selisih capaian relatif kecil, yang menunjukkan bahwa kondisi toleransi masyarakat sudah mendekati target, namun belum sepenuhnya terpenuhi.	1. Penguatan dialog dan komunikasi lintas kelompok masyarakat 2. Optimalisasi peran tokoh masyarakat dan tokoh agama 3. Peningkatan edukasi toleransi berbasis nilai kebangsaan
2	Meningkatnya Keterlibatan Komunitas	Indeks Keterlibatan Komunitas	45	50	111,11%	Realisasi Indeks Keterlibatan Komunitas melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan keterlibatan komunitas dalam kegiatan yang difasilitasi pemerintah daerah lebih baik dari yang direncanakan.	
3	Menurunnya konflik sosial di masyarakat	Indeks Konflik Sosial	45	40,59	110,86%	Sebagai indikator bernilai terbalik, realisasi Indeks Konflik Sosial yang lebih rendah dari target menunjukkan bahwa kondisi konflik sosial lebih baik dari yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian dan penanganan konflik sosial berjalan dengan baik.	

Sumber : IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.6, didapat uraian sebagai berikut :

a. Indeks Toleransi dengan target sebesar 89,5 terealisasi sebesar 86,81, sehingga belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya pelemahan penerimaan terhadap perbedaan di tengah masyarakat, yang perlu menjadi perhatian serius ke depan. Meskipun capaian tersebut relatif mendekati target, indikator ini

belum dapat dikategorikan berhasil dan memerlukan upaya penguatan yang lebih terarah pada tahun berikutnya.

b. Indeks Keterlibatan Komunitas menunjukkan kinerja yang baik, dengan realisasi sebesar 50 yang melampaui target sebesar 45. Capaian ini mencerminkan meningkatnya partisipasi dan keterlibatan komunitas dalam kegiatan yang difasilitasi pemerintah daerah, serta menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan dan kolaborasi dengan unsur masyarakat.

   Indeks Konflik Sosial, sebagai indikator bernilai terbalik, memiliki target sebesar 45 dan terealisasi sebesar 40,59. Realisasi yang lebih rendah dari target menunjukkan bahwa kondisi konflik sosial berada pada tingkat yang lebih baik dari yang direncanakan, sehingga indikator ini dapat dikategorikan berhasil. Hal ini mencerminkan upaya pengendalian dan penanganan konflik sosial yang relatif efektif, meskipun tetap memerlukan pemantauan dan pengendalian secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja menunjukkan bahwa sebagian indikator telah berhasil mencapai bahkan melampaui target, sementara indikator lainnya masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, pada tahun berikutnya fokus perbaikan diarahkan pada peningkatan Indeks Toleransi melalui penguatan dialog sosial serta edukasi nilai kebangsaan.

3.1.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi	89,5	86,81	96,99%	1.149.707.200	1.055.667.158	91,82%	5,6%
2	Meningkatnya Keterlibatan Komunitas	Indeks Keterlibatan Komunitas	45	50	111,11%	1.771.793.400	1.536.801.804	86,74%	28,1%
3	Menurunnya konflik sosial di masyarakat	Indeks Konflik Sosial	45	40,59	110,86%	2.240.526.400	2.033.094.090	90,74 %	22,2%

Sumber : IKU dan DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan Sasaran, kinerja yang menunjukkan tingkat efisiensi tertinggi adalah Indeks Keterlibatan Komunitas, dengan nilai efisiensi sebesar 28,1%. Tingginya efisiensi ini disebabkan oleh capaian kinerja yang melampaui target, yaitu 111,11%, sementara realisasi anggaran hanya mencapai 86,74% dari pagu yang ditetapkan. Efisiensi tersebut terjadi karena terdapat sebagian kegiatan yang tidak terealisasi, di mana kegiatan dimaksud tidak tercantum secara eksplisit dalam indikator kinerja program, namun berdampak terhadap tingkat realisasi anggaran.

Selanjutnya, kinerja Indeks Konflik Sosial juga menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 22,2%. Meskipun indikator ini bersifat terbalik (semakin rendah nilai semakin baik), capaian kinerja tetap melampaui target dengan persentase 110,86%, disertai realisasi anggaran sebesar 90,74%. Efisiensi ini dicapai melalui penguatan upaya pencegahan konflik, deteksi dini potensi konflik sosial, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penyelesaian permasalahan sosial di masyarakat.

Sementara itu, kinerja Indeks Toleransi Masyarakat menunjukkan efisiensi yang relatif lebih rendah, yaitu sebesar 5,6%. Hal ini disebabkan capaian kinerja yang masih berada sedikit di bawah target (96,99%) dengan tingkat penyerapan anggaran yang cukup tinggi, yaitu 91,82%. Meskipun demikian, berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi, dan penguatan nilai-nilai toleransi tetap dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya menjaga stabilitas sosial dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Keterlibatan Komunitas	Indeks Keterlibatan Komunitas	111,11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peningkatan Ormas/LSM yang ber-SKT	100,33	Menunjang	Capaian tersebut mendukung peningkatan keterlibatan dan kapasitas komunitas dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan meningkatnya legalitas dan pembinaan Ormas/LSM, program ini secara langsung menunjang pencapaian tujuan peningkatan keterlibatan komunitas.
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan	Persentase Ormas/LSM yang dibina	109,33	Menunjang	Berdampak positif terhadap penguatan peran organisasi kemasyarakatan, sehingga mendukung pencapaian

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				sasaran peningkatan keterlibatan komunitas.
	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi	96,99	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif	316,50	Menunjang	Capaian ini menunjukkan tingginya partisipasi dan keberfungsian lembaga masyarakat dalam mendukung ketahanan sosial dan budaya. Dengan meningkatnya aktivitas lembaga-lembaga tersebut, program ini secara nyata menunjang pencapaian sasaran peningkatan toleransi masyarakat.
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif	117,65	Menunjang	Peran aktif tokoh agama dan forum keagamaan berkontribusi langsung dalam menjaga keharmonisan sosial, sehingga kegiatan ini menunjang pencapaian tujuan peningkatan toleransi masyarakat.
2	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi	96,99	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	101,70	Menunjang	kegiatan pembinaan ideologi berjalan sesuai dengan target dan mendukung penguatan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat, sehingga menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								pencapaian sasaran peningkatan toleransi dan ketahanan sosial.
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan penanganan konflik	104,00	Menunjang	Kegiatan ini berkontribusi dalam menciptakan kondisi sosial yang lebih kondusif, sehingga menunjang pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di bidang stabilitas sosial.
	Menurunnya konflik sosial di masyarakat	Indeks Konflik Sosial	110,86	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang dimediasi	133,33	Menunjang	Pelaksanaan program ini berkontribusi langsung dalam menurunkan potensi konflik sosial, sehingga menunjang pencapaian sasaran menurunnya konflik sosial di masyarakat.
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan penanganan konflik	128,33%	Menunjang	Kegiatan ini memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merespons dan mengelola konflik sosial secara cepat dan tepat, sehingga mendukung pencapaian tujuan program kewaspadaan nasional dan stabilitas sosial.
3	Meningkatnya Keterlibatan Komunitas	Indeks Keterlibatan Komunitas	111,11	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan	195,65%	Menunjang	Pelaksanaan program ini mendukung peningkatan keterlibatan komunitas serta

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pendidikan politik			penguatan kesadaran politik masyarakat, sehingga menunjang pencapaian sasaran peningkatan keterlibatan komunitas.
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah pemilih pemula yang dibina	25,88	Menunjang	Meskipun capaian kuantitatif belum tinggi, kegiatan yang dilaksanakan tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pemahaman dan kesadaran politik pemilih pemula. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada pembinaan yang bersifat substantif dan terarah sesuai dengan perencanaan dalam DPA, sehingga tetap menunjang pencapaian sasaran peningkatan keterlibatan komunitas. -

Sumber : Data *Monev Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025*

Berdasarkan table 3.8 di atas seluruh program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjang IKU Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**	855.722.900	804.325.818	93,99
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	855.722.900	804.325.818	93,99
2	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	1.347.720.700	1.334.147.088	98,99
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.347.720.700	1.334.147.088	98,99
3	**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	424.072.700	202.654.716	47,79
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	424.072.700	202.654.716	47,79
4	**Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**	293.984.300	251.341.340	85,49

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	293.984.300	251.341.340	85,49
5	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	2.240.526.400	2.033.094.090	90,74
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.240.526.400	2.033.094.090	90,74
6	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	3.648.034.555	3.285.497.488	90,06
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.352.300	18.909.749	80,98
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.015.986.605	2.750.476.110	91,20
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.373.800	21.177.300	63,45
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	967.500	828.205	85,60
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.230.000	69.440.604	89,91
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.122.100	28.850.000	95,78
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.394.250	297.053.017	85,02
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.608.000	98.762.503	83,98

Sumber : Data Monev Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

   Program ini didukung anggaran sebesar Rp855.722.900 dengan realisasi sebesar Rp804.325.818 atau 93,99 persen. Realisasi anggaran digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila dan pembentukan karakter kebangsaan sesuai dengan target dalam Perjanjian Kinerja. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran

menunjukkan bahwa output kegiatan dapat dicapai secara optimal tanpa harus menyerap seluruh anggaran yang tersedia, melalui pengelolaan kegiatan yang efektif dan pemanfaatan sumber daya secara optimal.

2. Program Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.347.720.700 dengan realisasi sebesar Rp1.334.147.088 atau 98,99 persen. Realisasi anggaran digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan politik sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan capaian target kegiatan yang telah mencapai lebih dari 90 persen. Namun demikian, apabila ditinjau berdasarkan target Renstra, khususnya terkait jumlah peserta pemilih pemula yang ditetapkan sebanyak 255 orang, pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mencapai target optimal. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian jumlah peserta yang diundang dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu sebanyak 66 peserta, sesuai dengan perencanaan teknis dan penganggaran pada DPA tahun berjalan. Meskipun terdapat perbedaan antara target Renstra dan realisasi jumlah peserta, pelaksanaan kegiatan tetap berkontribusi terhadap pencapaian sasaran program, dengan penggunaan anggaran yang difokuskan pada kegiatan prioritas dan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia.
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

   Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp424.072.700 dengan realisasi Rp202.654.716 atau 47,79 persen. Rendahnya tingkat realisasi anggaran disebabkan oleh adanya kegiatan yang tidak terealisasi atau penyesuaian pelaksanaan kegiatan. Meskipun demikian, kegiatan yang terlaksana tetap mampu mendukung pencapaian sebagian target kinerja program, sehingga penggunaan anggaran yang terserap telah diarahkan secara selektif dan efisien sesuai prioritas dalam Perjanjian Kinerja.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

   Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp293.984.300 dengan realisasi Rp251.341.340 atau 85,49 persen. Realisasi anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan pembinaan dan penguatan

ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Efisiensi penggunaan anggaran tercermin dari capaian kinerja program yang tetap dapat dicapai dengan penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100 persen, tanpa mengurangi kualitas output kegiatan.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

   Program ini didukung anggaran sebesar Rp2.240.526.400 dengan realisasi Rp2.033.094.090 atau 90,74 persen. Anggaran dimanfaatkan untuk mendukung upaya peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai sasaran Perjanjian Kinerja. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa sebagian target kinerja dapat dicapai secara optimal meskipun terdapat sisa anggaran yang tidak terserap akibat penyesuaian pelaksanaan kegiatan.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp3.648.034.555 dengan realisasi Rp3.285.497.488 atau 90,06 persen. Realisasi anggaran digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan administrasi organisasi. Efisiensi penggunaan anggaran tercermin dari terjaganya dukungan operasional terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan, meskipun tidak seluruh anggaran terserap.

3.3 Inovasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan di tahun 2025 masih mengupayakan perubahan layanan-layanan yang masih menggunakan metode manual menjadi berbasis elektronik.

3.4 Penghargaan

Penghargaan yang diperoleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2025 :

1. Penghargaan diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai wujud apresiasi dan ucapan terima kasih atas

dukungan dan kerjasamanya menyukseskan pelaksanaan kegiatan GERAKAN PEMBAGIAN BENDERA MERAH PUTIH TAHUN 2025..

2. Penghargaan diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas Keberhasilan Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2025.

BAB IV
PENUTUP

Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang memadai. Secara umum, capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan. Adapun capaian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Indeks Keharmonisan Sosial terealisasi sebesar 59,13, dengan target 59,83, sehingga capaian kinerjanya sebesar 98,83%.
2. Indeks Toleransi terealisasi sebesar 86,81, dengan target 89,50, sehingga capaian kinerjanya sebesar 96,99%.
3. Indeks Keterlibatan Komunitas terealisasi sebesar 50,00, dengan target 45,00, sehingga capaian kinerjanya sebesar 111,11%.
4. Indeks Konflik Sosial terealisasi sebesar 40,59, dengan target 45,00, sehingga capaian kinerjanya sebesar 110,86%.

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan capaian indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan pada tahun pelaporan secara umum telah tercapai dan menunjukkan kinerja yang baik. Sebagian besar indikator kinerja utama telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif dalam mendukung terwujudnya stabilitas sosial, peningkatan toleransi, keterlibatan komunitas, serta pengendalian konflik sosial di Kota Pasuruan. Ke depan, capaian ini akan menjadi dasar untuk peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan

program, serta penguatan akuntabilitas kinerja, guna memastikan keberlanjutan hasil kinerja yang optimal dan berorientasi pada outcome.

1.2 Rekomendasi

1. Penguatan kualitas perencanaan kinerja berbasis outcome

   Perlu dilakukan penyempurnaan perencanaan kinerja dengan lebih menekankan pada keterkaitan antara program, kegiatan, dan indikator kinerja terhadap pencapaian outcome.

2. Optimalisasi penetapan target indikator kinerja

   Terhadap indikator yang capaian kinerjanya melebihi 100 persen, perlu dilakukan evaluasi terhadap penetapan target agar lebih realistis dan menantang

3. Penguatan Sinergi Antar-Pemangku Kepentingan

   Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara Bakesbangpol, instansi pemerintah lainnya, TNI, Polri, serta masyarakat sipil dalam mendeteksi dini dan menangani potensi konflik di masyarakat.

4. Peningkatan sinergi dan koordinasi lintas sector

   Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial, diperlukan penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan unsur TNI, POLRI, perangkat daerah terkait, serta elemen masyarakat, sehingga upaya pencegahan dan penanganan potensi konflik dapat dilakukan secara lebih komprehensif.Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang Lebih Intensif

   Melakukan pendekatan partisipatif dengan mengadakan diskusi, seminar, dan dialog kebangsaan di sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

5. Penguatan basis data dan sistem informasi kinerja

   Diperlukan pengelolaan data kinerja yang lebih akurat, terintegrasi, dan terdokumentasi dengan baik, termasuk data pendukung indikator

6. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

   Perlu dilakukan penguatan kapasitas aparatur melalui peningkatan kompetensi teknis dan pemahaman terhadap SAKIP, perencanaan kinerja, serta pengukuran dan pelaporan kinerja, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih profesional dan akuntabel.

7. Penguatan Pembinaan Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik

   Dengan meningkatnya nominal bantuan keuangan partai politik perlu dilakukan penguatan pembinaan oleh partai politik melalui pendidikan politik dan operasional sekretariat dengan didukung pengelolaan dan pelaporan dana hibah yang dilaksanakan secara tertib, transparan, dan kepatuhan penyampaian laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kepala Bakesbangpol Tahun 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ESELON II
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRS. MOKHAMAD FAQIH, M.SI
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ADI WIBOWO
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

DRS.MOKHAMAD FAQIH,M.SI
NIP. 196606221991031014

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

NAMA	:	DRS.MOKHAMAD FAQIH,M.SI
NIP	:	196606221991031014
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
JABATAN / KELAS JABATAN	:	Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / 14
PERANGKAT DAERAH	:	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Indeks Stabilitas	89
2.	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	8,3
3.	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	21

NO	PROGAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Rp 988.007.000**	
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	**Rp 1.501.370.400**	
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Rp 105.203.200**	
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Rp 384.477.300**	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	**Rp 1.735.185.900**	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Rp 3.800.572.812**	
JUMLAH		**Rp 8.514.816.612**	

Pasuruan, 02 Januari 2025

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

DRS. MOKHAMAD FAQIH,M.SI
NIP. 196606221991031014

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

NAMA	:	DRS. MOKHAMAD FAQIH,M.SI
NIP	:	196606221991031014
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
JABATAN / KELAS JABATAN	:	Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / 14
PERANGKAT DAERAH	:	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																													
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML							
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	Meningkatnya ketahanan dan kesatuan wilayah	Indeks Stabilitas	Persen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		80		80					
2	Meningkatnya ketahanan dan kesatuan wilayah	Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	Persen	0		0		2		0		0		3		0		0		4		0		0		8,3		8,3					
3	Meningkatnya ketahanan dan kesatuan wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	Persen	0		0		0		0		0		10		0		0		15		0		0		21		21					
CAPAIAN OUTPUT																																	
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																																	

NO	PROGAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Rp 988.007.000**	
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	**Rp 1.501.370.400**	
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Rp 105.203.200**	
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Rp 384.477.300**	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	**Rp 1.735.185.900**	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Rp 3.800.572.812**	
JUMLAH		**Rp 8.514.816.612**	

Pasuruan, 02 Januari 2025

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

DRS. MOKHAMAD FAQIH,M.SI
NIP. 196606221991031014

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Perubahan

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bakesbangpol Tahun 2025

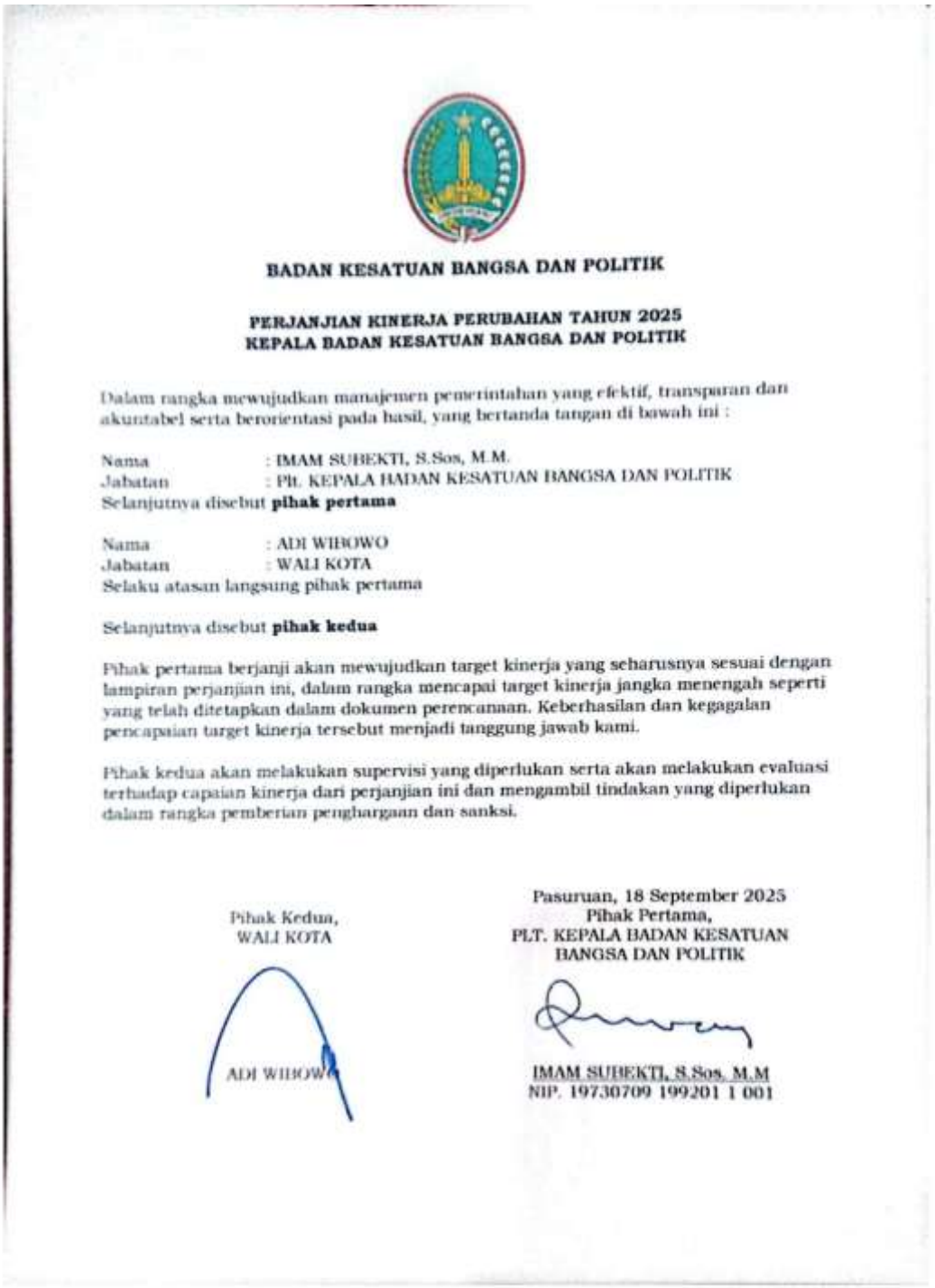

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM SUBEKTI, S.Sos, M.M.
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ADI WIBOWO
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 18 September 2025
Pihak Pertama,
PLT. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

IMAM SUBEKTI, S.Sos, M.M
NIP. 19730709 199201 1 001

Pihak Kedua,
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA : IMAM SUBEKTI, S.Sos. M.M
NIP : 19730709 199201 1 001
PANGKAT / GOL. : PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
JABATAN / KELAS JABATAN : Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / 14
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET (%)	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Toleransi dan Rukun	Indeks Stabilitas	Indeks Keharmonisan Sosial	89	59,83
2.	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Persentase peningkatan jumlah ormas yang aktif	Indeks Toleransi	8,3	89,5
3.	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Meningkatnya Keterlibatan Komunitas	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	Indeks Keterlibatan Komunitas	21	45
4.		Menurunnya konflik sosial di masyarakat		Indeks Konflik Sosial		45

Dipindai dengan CamScanner

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 796.611.500	Rp 855.722.900	
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Rp 1.347.720.700	Rp 1.347.720.700	
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 232.302.700	Rp 424.072.700	
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 217.626.700	Rp 293.984.300	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 1.987.590.400	Rp 2.240.526.400	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.610.423.013	Rp 3.648.034.555	
JUMLAH		Rp 8.192.275.012	Rp 8.810.061.555	

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pasuruan, 18 September 2025

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

IMAM SUBEKTI, S.Sos, M.M
NIP. 19730709 199201 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA	:	IMAM SUBEKTI, S.Sos. M.M
NIP	:	19730709 199201 1 001
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
JABATAN / KELAS JABATAN	:	Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / 14
PERANGKAT DAERAH	:	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																													
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML							
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Toleransi dan Rukun	Indeks Keharmonisasi Sosial	Indeks	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
2	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi	Indeks	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
3	Meningkatnya Keterlibatan Komunitas	Indeks Keterlibatan Komunitas	Indeks	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		45		45					
4	Menurunnya konflik sosial di masyarakat	Indeks Konflik Sosial	Indeks	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		45		45					
CAPAIAN OUTPUT																																	
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																																	

Dipindai dengan CamScanner

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Pengelolaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 796.611.500	Rp 855.722.900	
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Rp 1.347.720.700	Rp 1.347.720.700	
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 232.302.700	Rp 424.072.700	
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 217.626.700	Rp 293.984.300	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 1.987.590.400	Rp 2.240.526.400	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.610.423.013	Rp 3.648.034.555	
JUMLAH		Rp 8.192.275.012	Rp 8.810.061.555	

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pasuruan, 18 September 2025

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

IMAM SUBEKTI, S.Sos, M.M
NIP. 19730709 199201 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3 : Matriks Renstra

Matriks Renstra Bakesbangpol

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Keharmonisan Sosial	Indeks	59,83	60,00	61,00	61,67	62,67	63,33	
2	Indeks Toleransi	Indeks	89,5	90	91	92	93	93	
3	Indeks Keterlibatan Komunitas	Indeks	45	47	52	55	58	62	
4	Indeks Konflik Sosial	Indeks	45	43	40	38	37	35	

LAPORAN EFISIENSI SUMBER DAYA PADA PENCAPAIAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PAGU AWAL ANGGARAN	PAGU EFISIENSI/PAK	TARGET PERUBAHAN	REALISASI PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN
	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	**Indeks Toleransi**	**89,5**	**86,81**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kebutuhan penunjang yang terfasilitasi**	**100**	**99,44**	**3.800.572.812**	**3.648.034.555**	**100**	**99,44**	**3.285.497.488**
	Meningkatnya Keterlibatan Komunitas	**Indeks Keterlibatan Komunitas**	**45**	**50**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun**	**100**	**100**	**37.837.700**	**23.352.300**	**100**	**100**	**18.909.749**
	Menurunnya konflik sosial di masyarakat	**Indeks Konflik Sosial**	**45**	**40,59**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	33.313.100	22.134.100	6	6	18.081.134
					Koordinasi dan Penyusunan Lapran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	5	2.299.600	542.800	5	5	233.100
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	2.225.000	675.400	1	1	595.515
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**100**	**100**	**2.985.654.562**	**3.015.986.605**	**100**	**100**	**2.750.476.110**
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	21	2.954.435.662	2.992.047.205	21	21	2.728.171.127
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	17	17	31.218.900	23.939.400	17	17	22.304.983
					Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu**	**100**	**100**	**35.352.900**	**33.373.800**	**100**	**100**	**21.177.300**
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	35.352.900	33.373.800	4	4	21.177.300
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya**	**100**	**100**	**1.800.000**	**967.500**	**100**	**100**	**828.205**
					Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4	4	1.800.000	967.500	4	4	828.205
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**100**	**97,22**	**152.173.400**	**77.230.000**	**100**	**97,22**	**69.440.604**

					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2	1	7.969.200	7.025.200	1	1	6.940.830
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	6	15.000.000	6.603.500	6	6	6.488.889
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	1	2.204.400	1.102.200	1	1	900.000
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1	0	10.000.000	4.000.000	1	0	
					Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	12	18.000.000	9.000.000	12	12	5.620.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	98.999.800	49.499.100	12	12	49.490.885
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**100**	**65.919.600**	**30.122.100**	**100**	**100**	**28.850.000**
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7	2	65.919.600	30.122.100	2	2	28.850.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran**	**100**	**100**	**365.794.650**	**349.394.250**	**100**	**100**	**297.053.017**
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	93.068.200	93.068.200	12	12	67.266.826
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	272.726.450	256.326.050	12	12	229.786.191
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100**	**100**	**156.040.000**	**117.608.000**	**100**	**100**	**98.762.503**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	44.370.000	32.888.000	1	1	23.150.252
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7	7	70.160.000	47.800.000	7	7	42.800.806
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	19	19	12.110.000	7.520.000	19	19	3.528.445

					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantro dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	29.400.000	29.400.000	1	1	29.283.000
					PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	10	**10,17**	**988.007.000**	**855.722.900**	**10**	**10,17**	**804.325.818**
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Persentase Peningkatan penanganan konflik**	3	**3,13**	**988.007.000**	**855.722.900**	**3**	**3,13**	**804.325.818**
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60	180	25.968.500	65.600.000	60	180	65.300.000
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	1	15.653.000	6.538.600	1	1	6.321.290
					Pembentukan PASKIBRAKA	Jumlah PASKIBRAKA	74	74	946.385.500	783.584.300	74	74	732.704.528
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Prosentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan pendidikan politik**	20	**39,13**	**1.501.370.400**	**1.347.720.700**	**20**	**39,13**	**1.334.147.088**
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**Jumlah pemilih pemula yang dibina**	255	**66**	**1.501.370.400**	**1.347.720.700**	**255**	**66**	**1.334.147.088**

					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah ya	1	1	1.244.638.100	1.235.458.200	1	1	1.232.163.054
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situas	189	105	256.732.300	112.262.500	106	105	101.984.034
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Persentase Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT**	3	**3,01**	**105.203.200**	**424.072.700**	**3**	**3,01**	**202.654.716**
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina**	40	**43,73**	**105.203.200**	**424.072.700**	**40**	**43,73**	**202.654.716**
					Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	185	504	79.123.800	217.890.500	510	504	202.654.716
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40	0	15.595.900	202.662.600	95	0	

					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	1,00	10.483.500	3.519.600	1	1,00	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Persentase lembaga ekonomi,sosial dan budaya yang aktif**	20	**63,30**	**384.477.300**	**293.984.300**	**20**	**63,30**	**251.341.340**
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Prosentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif**	85	**100**	**384.477.300**	**293.984.300**	**85**	**100**	**251.341.340**
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40	30	12.786.900	6.560.000	30	30	5.299.760
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400	550	365.299.400	284.683.200	160	550	246.041.580
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	1	6.391.000	2.741.100	1	1	

					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase Konflik yang dimediasi**	75	**100**	**1.735.185.900**	**2.240.526.400**	**75**	**100**	**2.033.094.090**
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Persentase peningkatan penanganan konflik**	3	**3,85**	**1.735.185.900**	**2.240.526.400**	**3**	**3,85**	**2.033.094.090**
					Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konf	3.750	12.483	1.334.842.300	1.877.156.000	3.750	12.483	1.739.466.145
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yaitu melakukan kegiatan pemantauan orang asing, TKA asing dan lembaga asing	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	1	12	254.928.700	187.975.300	12	12	154.389.200
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	145.414.900	175.395.100	1	1	139.238.745

Penjelasan :

Berdasarkan Instruksi Presiden (InPres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2025, maka sebagai tindak lanjut dari InPres tersebut, dilakukan efisiensi pada rekening belanja berikut :

- Belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, seminar/FGD
- Belanja Perdin
- Belanja honorarium
- Belanja habis pakai seperti ATK,kertas dan cover.

Pagu anggaran induk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp8.514.816.612,00, sedangkan pagu anggaran setelah efisiensi dan Perubahan Anggaran (PAK) menjadi sebesar Rp8.810.061.555,00. Tahun Anggaran 2025, seluruh subkegiatan mengalami efisiensi anggaran. Namun demikian, terdapat beberapa subkegiatan yang mengalami peningkatan alokasi anggaran yang berasal dari pergeseran anggaran pada subkegiatan lain yang mengalami pengurangan. Adapun subkegiatan yang mengalami perubahan anggaran secara signifikan adalah sebagai berikut:

1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu induk Rp. 2.954.435.662 mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 37.611.543 untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji PPPK.
2. Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan pagu induk Rp. 25.968.500 mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 39.631.500 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Sarasehan Kebangsaan yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kerukunan masyarakat Kota Pasuruan , mengingat pada saat itu kondisi sosial masyarakat kurang kondusif akibat meningkatnya aksi penyampaian pendapat (demonstrasi) terkait penyelenngaraan pemerintahan Indonesia.
3. Subkegiatan Pembentukan PASKIBRAKA pagu induk Rp 946.385.500 mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 162.801.200. Pengurangan tersebut meliputi belanja rekening ATK,kertas, cover, bahan lainnya, sewa kendaraan, perjalanan dinas, honorarium dan jasa penyelenggara acara.
4. Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah pagu induk Rp 15.595.900 mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 187.066.700 untuk pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya, kegiatan tersebut tidak terealisasikan, karena berdasarkan hasil studi tiru ke BAKESBANGPOL Provinsi Jawa Timur, BAKESBANGPOL Kota/Kab di Jawa Timur belum ada yang menjalankan kegiatan tersebut.
5. Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pagu induk Rp 365.299.400 mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 80.616.200. Anggaran tersebut lebih difokuskan untuk kegiatan pembinaan bahaya penyalahgunaan Narkoba bagi para pelajar, sehingga kegiatan yang bersifat tidak prioritas dihapus.
6. Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pagu induk Rp 1.334.842.300 mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 542.313.700 untuk biaya operasional Kegiatan Pengamanan Event-event di Kota Pasuruan.
7. Subkegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota pagu induk Rp. 145.414.900 mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 29.980.200 untuk mendukung terlaksananya dan kelancara kegiatan FORKOPIMDA.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

HERY DWI SUJATMIKO, S.Sos, MM.
NIP. 197012231990031001